

“TANTANGAN BERAT NAN MULIA WARGA KAMPUS” DALAM ERA PANDEMI RADIKALISME KORUPSI DI NKRI

STUDIUM GENERALE

26 MARET 2021

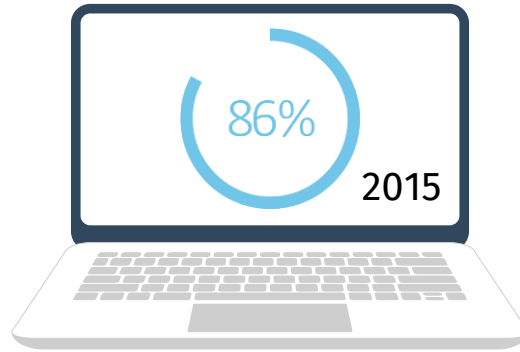
Muh Busyro Muqoddas
(Dosen UII dan Advokat)



Pengantar



Pelaku Tindakan
Kejahatan
Perampokan
Harta Negara
Lulusan Perguruan
Tinggi



Latar Belakang
Pendidikan
S1 - S3



Home - News - National

KPK Catat 64 Persen Koruptor adalah Alumni Perguruan Tinggi

Kamis 01 Okt 2020 17:12 WIB
Berita Terbaru



Penjabat PKP Nurul Ghufron menyampaikan di perseri pemberitaan nasional

Jawa, detik.com/News/berita

Faktanya berpendidikan tinggi justru tidak memiliki karakter antikorupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan berdasarkan data, **pelaku korupsi** adalah orang berpendidikan. Sebanyak 64 persen pelaku korupsi tercatat alumni perguruan tinggi (PT).

"Jadi, kalau lebih detil tadi 64 persen adalah alumni dari perguruan tinggi, dari 64 persen yang tertinggi adalah 52, dari 52 baru kemudian 51 baru 53," kata Ghufron, saat menjadi narasumber dalam acara "Virtual Studium Generale dan Peluncuran Kuliah Online Pendidikan Antikorupsi" yang disiarkan akun Youtube KPK, Kamis (1/10).

UNIVERSITAS
CENDEKIA MADA

BERITA - LIPUTAN BERITA - PELAKU KORUPSI DIDOMINASI LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI

Rilis Berita

Pelaku Korupsi Didominasi Lulusan Pendidikan Tinggi
17 Oktober 2017, 15:05 WIB | Oleh: Gual | 3727 | PDF Version

Pelaku Korupsi Didominasi Lulusan Pendidikan Tinggi

Korupsi sudah dilakukan sebagai tindakan kejahatan luar biasa bahkan dianggap perbuatan yang melanggar norma dan aturan yang sudah dibuat oleh negara. Meski sudah dilakukan upaya pencegahan dan penindakan tegas, namun perilaku

Menyampaikan Persepsi Masyarakat terhadap
Wabah Covid-19

Sekolah Penasejara UGM Gelar IGSSCI
Ker-19

Dua Mahasiswa Prodi Doktor UGM Raih
Juara II Internasional 2019

Tim Andela UGM Juara II Agnisari
International

Info

Menyempik Studi dan Gambaran MKWU
Fakultas Teknik Universitas Cendekia Mada

Menyempik Mawada Diploma dan Sarjana
UGM Berada Asas-1918

Jenis Jabatan/Pekerjaannya



Pegawai Negeri, Pejabat pemerintah pusat s/d daerah,



DPR/DPRD, Hakim, Jaksa, Polisi, Duta Besar, KPU, Bank Indonesia, BUMN,



Pejabat

Digaji oleh rakyat melalui pengaturan oleh negara

Obyek Perampokan



Proyek Bangunan Fisik
Jalan, Gedung, Rumah Sakit, dan lainnya

Home / News / Nasional

BERITA FOTO: KPK Sita Rp 52,3 Miliar Terkait Korupsi Ekspor Benih Lobster

kompas.com - 16/05/2021, 08:23 WIB

BAGIKAN:  



Proyek pembangunan yang berjalan di atas tumpukan barang, akan kami selidiki. (Korupsi) (KPK) (Jakarta, Kamis 13/05/2021). (KPK menyita uang senilai Rp 52,3 miliar terkait ekspor benih lobster di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Indonesia).

Ad closed by Google

Penulis: Irfan Kamil | Editor: Kristian S
JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik menyita uang tunai Rp 52,3 miliar (15/5/2021).

KPK menyita Rp 52,3 miliar dari satu terkait perjanjian ekspor benih lobster ke Gabungan dan Perikanan Etny Prabu, Kabiro Humas KPK Febi Diarsyah kepada wartawan, Kamis (14/5/2021).

Uang tersebut dibawa masuk ke G-trol barang.

detikNews | Berita

KPK Usut Korupsi Infrastruktur Lagi, Negara Diduga Rugi Puluhan Miliar

Hana Fadhill - detikNews

Kamis, 14 Mei 2019 15:08 WIB

0 komentar

SHARE



Foto: Gedung KPK, (Agung Pambudi/detik.com)

Jakarta - KPK kembali mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Kali ini, proyek infrastruktur yang diduga dikorupsi berasal di daerah.

"Sore atau malam ini jika tidak ada kendala akan kami sampaikan perkembangan hasil penyelidikan kasus korupsi infrastruktur di daerah," kata Kabiro Humas KPK Febi Diarsyah kepada wartawan, Kamis (14/5/2021).

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pusat UKAM) Zaenat Diarsyah menanggapi pengungkapan Romsasumuly dan dua pegawai Kementerian KPK di Jawa Timur (13/5/21).

Dugaan jual beli jabatan hingga korupsi Quran dan dana haji: Ada apa dengan Kementerian Agama?

Call center 0800 News Indonesia

19 Mei 2019



JAKARTA (KOMPAS.com) - Kasus PPP Romsasumuly mengungkap dugaan korupsi di Kementerian Agama.

Penelitian diungkap KPK, Jakarta, Sabtu (13/5/21).

Dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Penasihat Pengajaran (PPP) Buhamed Romsasumuly diduga tak terlepas dari pengaruh partai politik, kata seorang pegawai anti korupsi.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pusat UKAM) Zaenat Diarsyah menanggapi pengungkapan Romsasumuly dan dua pegawai Kementerian KPK di Jawa Timur (13/5/21).

Penelitian diungkap KPK, Jakarta, Sabtu (13/5/21).

Dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Penasihat Pengajaran (PPP) Buhamed Romsasumuly diduga tak terlepas dari pengaruh partai politik, kata seorang pegawai anti korupsi.

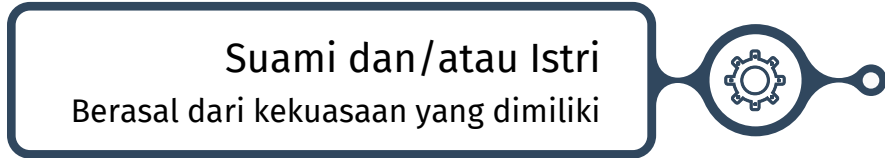
Penelitian diungkap KPK, Jakarta, Sabtu (13/5/21).

Penelitian diungkap KPK, Jakarta, Sabtu (13/5/21).

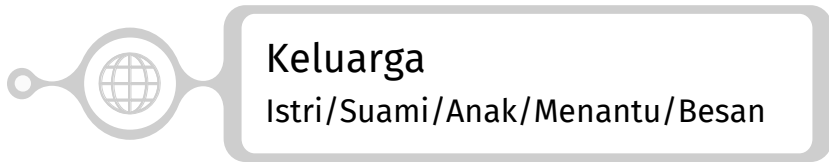
Penelitian diungkap KPK, Jakarta, Sabtu (13/5/21).

Penelitian diungkap KPK, Jakarta, Sabtu (13/5/21).

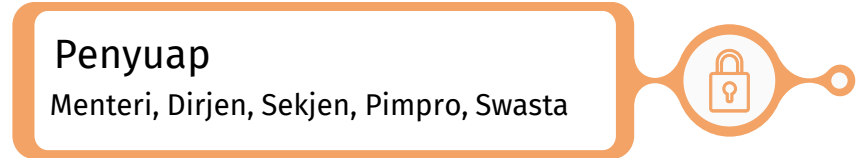
Pelaku Utama



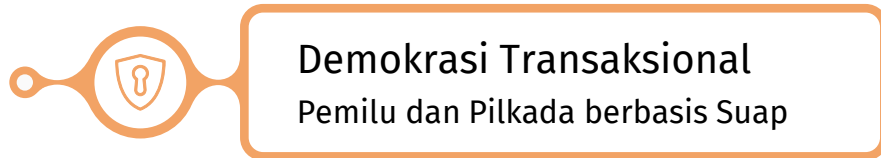
Pembantu Utama



Jabatan



Akar dan Sumber Korupsi



Dampak Pemilu-Pilkada Transaksional



01

Terbentuknya susunan kekuasaan pusat sd daerah yang dikuasai oleh pemenang pemilu-pilkada berbasis suap.

02

Terpilihnya sejumlah anggota DPR/DPRD/DPD berbasis suap.

03

Dipilihnya pejabat berdasarkan kedekatan karena “komplotan dan kepentingan mereka bersama”.

04

Produknya terbentuk “ State Capture Corruption” (perampokan resmi harta negara oleh Pejabat Negara)

[nasional.tempo.co](#) › [read](#) › [empat-fa...](#) ▼ [Translate this page](#)

[Empat Fakta dalam Perkara Korupsi Bekas Menpora Imam ...](#)

Jun 30, 2020 — Jurnalis mengambil gambar sidang putusan terdakwa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (**Menpora**) Imam Nahrawi yang disiarkan secara ...

[www.bbc.com](#) › [indonesia-48018603](#) ▼ [Translate this page](#)

[Mantan Menteri Sosial Idrus Marham divonis tiga tahun ... - BBC](#)

Apr 23, 2019 — Hakim Pengadilan Tindak Pidana **Korupsi** menjatuhkan vonis hukuman penjara tiga tahun terhadap mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, ...

[www.kpk.go.id](#) › [Berita](#) › [Siaran Pers](#) ▼ [Translate this page](#)

[KPK Tangkap Menteri Kelautan dan Perikanan](#)

Nov 26, 2020 — Jakarta, 25 November 2020 -- Komisi Pemberantasan **Korupsi** mengamankan EP (**Menteri Kelautan dan Perikanan**) dan 16 orang lainnya ...

[nasional.kompas.com](#) › ... › [Nasional](#) ▼ [Translate this page](#)

[Kasus Korupsi Mensos Juliari, Bansos Berbentuk Sembako ...](#)

Kasus **Korupsi Mensos** Juliari, Bansos Berbentuk Sembako Dinilai Perlu Dikaji. Kompas.com - 09/12/2020, 14:50 WIB. Bagikan: Komentar. **Menteri Sosial** Juliari ...

[antikorupsi.org](#) › [article](#) › [menyoal-i...](#) ▼ [Translate this page](#)

[Menyoal Integritas Kejaksaan Agung dalam Perkara Djoko ...](#)

Menyoal Integritas **Kejaksaan Agung** dalam Perkara **Djoko Tjandra** dan Jaksa Pinangki. Monday, 07 September 2020 - 17:20. Public Accountability Review.

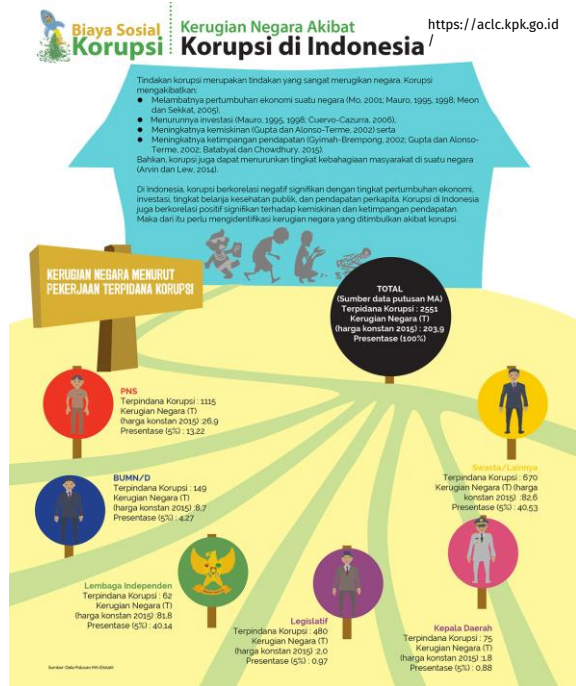
DAMPAK LANGSUNG PERAMPOKAN SISTEMIK :



Kerugian Rakyat dan Sumber Daya Alam

2

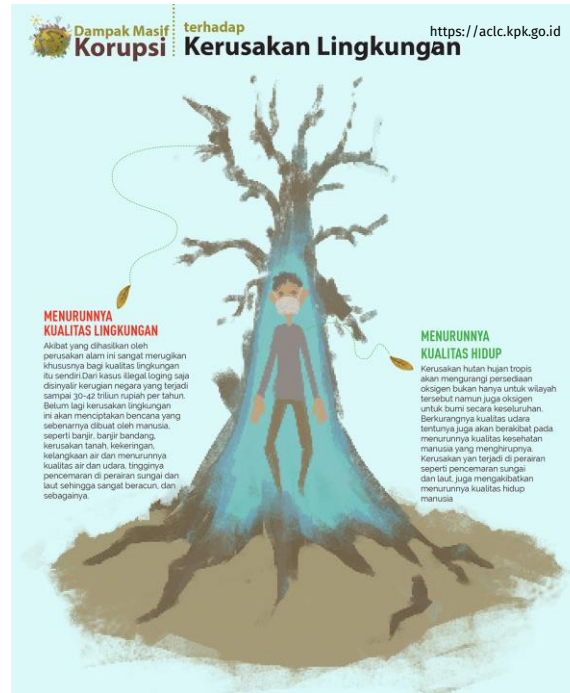
Pembunuhan pelan-pelan jiwa rakyat sebagai dampak pemiskinan sosial ekonomi politik.



Kerugian Rakyat dan Sumber Daya Alam

3

Eksplorasi hutan, laut, tambang, tanah sawah, pekarangan, hutan lindung, sumber daya air.



Kerugian Rakyat dan Sumber Daya Alam



4

Terbentuk masyarakat diam/cuek/apatis (silence society) yang subur untuk dikolonisasi oleh minoritas tiranik sebagian kecil bangsa sendiri. Dan menjadi lahan subur sebagai tambang suara pemilih sekaligus tumbal politik 5 tahunan dalam Pemilu Pilkada Transaksional. Sesudahnya mereka bernasib sebagai limbah politik rezim korup status radikal.



Beranda > Esai > Fenomena Apatisme Masyarakat terhadap Politik di Indonesia

Fenomena Apatisme Masyarakat terhadap Politik di Indonesia

Esai, Politik, Politik Indonesia 28 July 2017, 12:36 Oleh: 0

Sebagai negara yang memiliki kendala tersendiri dalam beberapa daerah di Indonesia, ibukota pun justru jadi...
Apatis...
ada...
jadi...
orang...

Meskipun...
paham dengan...
paham dengan politik...
tidak paham dengan...

Recent Posts

Potret Manusia Perkasa Difabel Biora Mustika

(Jog)Jakarta

Agenda Besar

Urgensi Krisis Interaksi Sosial Dan Politik Uang Meraja Lela

Giligan (Gerakan Peduli Keluar Anak Jalanan): Penanganan Anak Jalanan Berbasis Komunitas

Penutup

1

TUHAN ALLAH SWT TIDAK AKAN MERUBAH NASIB SUATU BANGSA, SELAMA TIDAK ADA GERAKAN PERUBAHAN DARI ELEMEN BANGSA ITU.

2

NEGERI INI BERDIRI ATAS JASA TOKOH2 PEJUANG BERSAMA RAKYAT YANG CERDAS SPIRITUAL (ROHANIAH) KARENA TAAT DAN SOLEH DALAM BERAGAMA.

3

MEREbut KEMBALI HAKEKAT KEMERDEKAAN BANGSA DEMI RAKYAT YANG BERDAULAT ADALAH "WAJIB SECARA AGAMA DAN NASIONALISME "

4

REZIM KORUP DAN REPRESIF 32 TAHUN SERTA ANTI KEMANUSAAN DIBAWAH ORDE BARU, BERHASIL RONTOK OLEH GERAKAN MPRA; KAMPUS BERSAMA MAHASISWA DOSEN RAKYAT di th 1998

5

KEKUATAN ILMU BERBASIS JIWA IMAN KEAGAMAAN DAN KEMERDEKAAN BERPIKIR BEBAS AKAN MENENTUKAN MASA DEPAN GENERASI MENDATANG. ILMUWAN TUKANG SAATNYA DIKANDANGKAN SEBAGAI SAMPAH PERADABAN.

Saran



1

**Perkuat dan luruskan
niat menjadi Pemimpin
Berilmu Amaliah
Beramal Ilmiah.**

Saran



2

Mempertegas dan memperkokoh “konsep teori ilmu Elektro” yang memiliki unsur “moral”. Berikut metode pemanfaatannya yang hanya untuk tujuan pencapaian “kemanfaatan kemanusiaan secara hakiki”. Sekaligus menjauhkan dari potensi Ilmuwan Tukang berbasis Upah semata” yang berdampak sebagai ilmuwan transaksional.

Saran



3

Aktif dalam aktivitas
kepemimpinan dan Studi serta
amaliah kemanusiaan
keilmuan kemasyarakatan.

Saran



4

Bermimpi : “Sukses Ibadah,
Studi, dan Organisasi”

THANK YOU